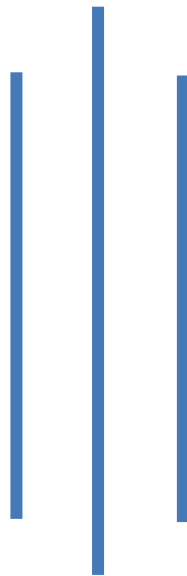


BAHAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKP)

GUBERNUR SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019



BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2020

**BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
JL. POM IX KAMPUS PALEMBANG
TELP. 0711-310633 FAX 0711-319819 KODE POS 30137**

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
GUBERNUR SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

1. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Dalam rangka peningkatan penerimaan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah dilakukan upaya-upaya intensifikasi maupun ekstensifikasi antara lain:

1.1 Pendapatan Asli Daerah

a. Pajak Daerah:

- 1) Memperluas dan mendekatkan titik pelayanan kepada masyarakat melalui peningkatan kelas 8 unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) dan pembentukan 8 UPTB baru, Samsat Mall, dan Samsat Pembantu.
- 2) Melakukan kerjasama dengan mitra kerja antara lain :
 - Pendampingan tim korsupgah KPK dalam optimalisasi pendapatan daerah
 - Integrasi data wajib pajak pusat dengan data wajib pajak daerah pada Dirjen Pajak Kementerian Keuangan
 - Pembangunan zona integritas di kantor pelayanan kesamsatan bersama Dirlantas Polri
 - Koordinasi dengan pemerintah daerah dalam mendukung peningkatan penerimaan daerah
 - Perpanjangan kerjasama dengan BP Batam dalam rangka back up database server utama yang ada main/recovery data.
 - Perpanjangan kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka penambahan kuato akses data kependudukan

- Kerjasama dengan BPH Migas terkait akurasi data penyaluran Bahan Bakar Minyak di Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka peningkatan penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- 3) Memperkuat dukungan Teknologi Informasi
- Pembangunan dan pengembangan aplikasi samsat bapenda, perbaikan sistem informasi manajemen (SIM) terkait pengolahan, pengamanan dan up grading data serta peralatan pengolahan data yang lebih canggih dan modern
 - Pengembangan Aplikasi E-Samsat berupa Layanan Samsat Online Nasional dan Layanan Samsat Online Sumsel
 - Pengembangan layanan pembayaran pajak melalui *modern channel* seperti Alfamart, Indomaret, Bukalapak dan PT. POS Indonesia
- 4) Secara berkala melaksanakan rapat koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi Sumatera Selatan untuk membahas kendala dan permasalahan yang timbul di lapangan;
- 5) Meningkatkan kinerja Tim Optimalisasi Pendapatan Daerah (OPAD), antara lain :
- Melakukan penagihan langsung kepada objek-objek pajak daerah di lapangan, seperti objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)/Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Alat Berat dan Pajak Air Permukaan (PAP) yang berada di semua kabupaten/kota se-Sumatera Selatan;
 - Mengintensifkan pendataan objek Pajak Kendaraan Bermotor terhadap kendaraan bermotor yang berasal dari luar provinsi (Nopol non-BG) yang beroperasi di Provinsi Sumatera Selatan melalui razia kendaraan bermotor bersama-sama dengan instansi terkait

- 6) Melakukan penagihan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor secara persuasif dengan cara mendatangi langsung ke *showroom* kendaraan atau ke *leasing* kendaraan-kendaraan bermotor;
- 7) Melakukan pendekatan dan koordinasi dengan *showroom* penjual kendaraan bermotor bekas dalam upaya meningkatkan penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua (BBN-KB II).
- 8) Melakukan rapat rekonsiliasi penerimaan Pajak Air Permukaan dan PBB KB bersama dengan wajib pajak dan wajib pungut di bawah supervisi dari tim Korsupgah KPK bidang Optimalisasi Pendapatan Daerah.
- 9) Meningkatkan partisipasi dan pemahaman masyarakat akan pentingnya kewajiban membayar pajak melalui penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat di kabupaten/kota se-Sumatera Selatan;
- 10) Kegiatan sosialisasi baik media sosial dan terjun langsung kelapangan serta pemberian reward kepada wajib pajak
- 11) Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan sarana prasarana, peningkatan kualitas layanan sumber daya manusia, mempercepat proses layanan.
- 12) Review peraturan terkait pajak daerah antara lain Peraturan Gubernur nomor 21 tahun 2019 terkait dengan penerapan BBN-II terhadap pembelian kendaraan bermotor melalui pembiayaan leasing dalam rangka mengoptimalkan penerimaan BBN KB.
- 13) Pengawasan dan pembinaan internal, mendapat apresiasi dari tim korsupgah kpk penyelesaian laporan paling awal 100% dibanding OPD lain.

b. Retribusi Daerah:

- 1) Melakukan rapat koordinasi secara berkala antar dinas/instansi pemungut retribusi daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka membahas kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas-tugas pemungutan retribusi daerah;
- 2) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Selatan yang mengatur tentang retribusi daerah terutama tentang pemberlakuan tarif retribusi daerah yang telah diberlakukan lebih dari lima tahun;
- 3) Melakukan inventarisasi tentang adanya objek-objek retribusi baru yang selama ini belum tertampung dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang telah ada.

c. Bagian Penerimaan Hasil Laba BUMD dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan:

- 1) Mengupayakan peningkatan penerimaan dari masing-masing Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, antara lain dalam bentuk peningkatan penyertaan modal kepada masing-masing BUMD di lingkungan Pemerintah Sumatera Selatan;
- 2) Mengadakan koordinasi dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan guna mencari upaya untuk meningkatkan penerimaan daerah dari bagi hasil laba BUMD dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- 3) Melakukan evaluasi terhadap potensi yang dapat dimanfaatkan dalam upaya peningkatan kontribusi BUMD, salah satunya dengan membuat rencana bisnis perusahaan.

d. Bagian Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah:

- 1) Mengupayakan peningkatan pendapatan di sektor Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah dengan mengoptimalkan dan mengintensifkan jenis-jenis pendapatan dari komponen penerimaan Lain-lain PAD yang Sah antara lain penerimaan jasa giro dari Bank Sumsel Babel dan penerimaan-penerimaan lainnya.
- 2) Meningkatkan kinerja Badan Layanan Unit Daerah (BLUD) dalam mengalih pendapatan asli daerah.

1.2. Pendapatan Transfer

Mengupayakan peningkatan Pendapatan Daerah dari sektor penerimaan Pendapatan Transfer, baik komponen penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak. Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan antara lain:

- 1) Melakukan rapat koordinasi bersama Direktorat Jenderal Minyak dan Gas pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta dalam rangka membahas Lifting Minyak dan Gas, Bidang Pertambangan Umum, serta Dana Bagi Hasil Bidang Kehutanan;
- 2) Melakukan rapat koordinasi dan rekonsiliasi bersama Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan pada Kementerian Keuangan RI di Jakarta dalam rangka membahas pelaksanaan penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Bagi Hasil Bidang Pertambangan Umum dan Dana Bagi Hasil Bidang Kehutanan;
- 3) Realisasi dari semua kegiatan tersebut akan dituangkan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk selanjutnya akan dijadikan pedoman dan patokan terhadap besarnya pembagian Pendapatan Transfer yang akan diterima oleh masing-masing Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan selanjutnya akan didistribusikan ke masing-masing

Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan jatah/porsinya masing-masing.

1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Upaya optimalisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah antara lain dari sektor Pendapatan Hibah dari beberapa perusahaan BUMN maupun perusahaan BUMS yang berada dan beroperasi di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Adapun upaya-upaya optimalisasi atau intensifikasi Pendapatan Daerah dari sektor pendapatan ini dapat dilakukan antara lain:

- 1) Meningkatkan koordinasi dengan BUMN maupun BUMS agar berperan aktif dan berpartisipasi dalam mendukung program pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan. Dengan dilakukannya pendekatan yang intensif kepada masing-masing BUMN maupun BUMS tersebut maka diharapkan kepada masing-masing BUMN dan BUMS dapat meningkatkan kontribusinya terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- 2) Terus mengadakan pendekatan kepada beberapa BUMN maupun BUMS yang belum memberikan kontribusi pada Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk selanjutnya diharapkan dapat memberikan kontribusinya terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

2. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pada Tahun Anggaran 2019, Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan ditargetkan penerimaannya sebesar Rp.9.849.942.842.746,55 dan sampai akhir tahun 2019 dapat terealisasi sebesar Rp.9.280.742.072.448,62 atau 94,22%. Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melampaui target yang telah ditetapkan atau 101,68%. Sebagian besar komponen PAD mencapai target yang telah ditetapkan seperti pajak daerah yang menjadi tugas pokok Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tercapai sebesar 102,40%, penerimaan Retribusi Daerah terealisasi sebesar 131,77% dan penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan terealisasi sebesar 100,70%. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019

	U R A I A N	Tahun 2019		
		Target	Realisasi	(%)
I	PENDAPATAN DAERAH	9.849.942.842.746,55	9.280.742.072.448,62	94,22
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.436.828.903.746,55	3.494.510.853.251,62	101,68
A	PAJAK DAERAH	3.071.784.718.796,00	3.145.558.634.339,38	102,40
	P K B	905.040.000.000,00	979.347.884.263,00	108,21
	-PKB R2/R4	900.000.000.000,00	974.117.378.669,00	108,24
	-PKB Alat Berat	4.800.000.000,00	4.986.889.104,00	103,89
	-PKAA	240.000.000,00	243.616.490,00	101,51
	BBN - KB	913.245.000.000,00	932.817.466.919,00	102,14
	-BBN-KB R2/R4	910.000.000.000,00	929.917.321.275,00	102,19
	-BBN-KB Alat Berat	3.170.000.000,00	2.870.674.594,00	90,56
	-BBN-KAA	75.000.000,00	29.471.050,00	39,29
	PBB - KB	760.000.000.000,00	831.263.590.286,08	109,38
	PAP	10.965.000.000,00	12.323.588.808,30	112,39
	PAJAK ROKOK	482.534.718.796,00	389.806.104.063,00	80,78
B	RETRIBUSI DAERAH	9.136.079.600,00	12.038.355.783,00	131,77
C	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	89.676.728.820,00	90.304.005.859,82	100,70
D	LAIN-LAIN PEND. ASLI DAERAH YG SAH	266.231.376.530,55	246.609.857.269,42	92,63
1.2.	PENDAPATAN TRANSFER	6.381.903.769.000,00	5.765.176.417.582,00	90,34
1.2.1	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAHAN PUSAT	6.315.428.531.000,00	5.698.701.179.582,00	90,23
A	BAGI HASIL PAJAK	860.077.454.680,00	763.869.161.523,00	88,81
B	BAGI HASIL BUKAN PAJAK / SDA	1.353.654.217.320,00	931.599.821.119,00	68,82
C	DANA ALOKASI UMUM	1.743.742.960.000,00	1.743.742.960.000,00	100,00
D	DAK FISIK	267.864.216.000,00	231.438.283.947,00	86,40
E	DAK NON FISIK	2.090.089.683.000,00	2.028.050.952.993,00	97,03
1.2.2	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAHAN PUSAT LAINNYA	66.475.238.000,00	66.475.238.000,00	100,00
	DANA PENYESUAIAN (Dana Insentif Daerah)	66.475.238.000,00	66.475.238.000,00	100,00
1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YG SYAH	31.210.170.000,00	21.054.801.615,00	67,46
A	PENDAPATAN HIBAH	30.253.041.000,00	20.415.551.615,00	67,48
B	PENDAPATAN LAINNYA	957.129.000,00	639.250.000,00	66,79

Data Audit BPK

Penerimaan pendapatan daerah tahun 2019 meningkat sebesar Rp.139.370.677.348,83 atau 1,52% dibandingkan dengan penerimaan tahun 2018, seperti tabel berikut.

Tabel 2.2
Perbandingan Realisasi Pendapatan Daerah
Provinsi Sumsel Tahun 2018 dan 2019

No	Uraian	Realisasi		Tambah/Kurang	%
		2018	2019		
1	Pendapatan Asli Daerah	3.528.010.712.183,54	3.494.510.853.251,62	(33.499.858.931,92)	(0,95)
2	Pendapatan Transfer	5.577.767.500.414,00	5.765.176.417.582,00	187.408.917.168,00	3,36
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	35.593.182.502,25	21.054.801.615,00	(14.538.380.887,25)	(40,85)
Jumlah Pendapatan Daerah		9.141.371.395.099,79	9.280.742.072.448,62	139.370.677.348,83	1,52

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2019

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Prov. Sumsel tahun 2019 terdiri dari komponen Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pada Tahun Anggaran 2019 penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Selatan ditargetkan sebesar Rp3.436.828.903.746,55 sampai akhir tahun 2019 dapat terealisasi sebesar Rp3.494.510.853.251,62 atau 101,68%. Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan PAD tahun 2018 sebesar Rp3.528.010.712.183,54 atau berkurang sebesar Rp31.850.581.478,81 atau 0,95%.

Penerimaan PAD dibandingkan tahun 2018 mengalami penurunan dikarenakan penerimaan dari komponen pajak daerah yaitu Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB

KB) dan Pajak Rokok yang lebih rendah dibandingkan tahun 2018 lalu. Terjadinya penurunan pembelian kendaraan baru menyebabkan penerimaan pajak dari BBNKB menurun. Sementara penurunan penerimaan PBBKB dikarenakan penerimaan dari wajib pungut terbesar yaitu Pertamina berkurang dan beberapa perusahaan wajib pungut yang tidak ada setoran ditahun 2019. Adapun transfer pajak rokok tidak sesuai dengan yang ditargetkan karena adanya pemotongan pajak rokok sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 128/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak rokok Sebagai Kontribusi Dukungan Program Jaminan Kesehatan.

2. Pendapatan Transfer

Bagian Pendapatan Transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat terdiri dari Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi khusus dan Dana Penyesuaian (Dana Insentif Daerah). Pada Tahun Anggaran 2019 ditargetkan sebesar Rp6.381.903.769.000,00 terealisasi sebesar Rp 5.765.176.417.582,00 atau 90,34%. Dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun 2018 sebesar Rp5.577.767.500.414,00 mengalami kenaikan sebesar Rp125.221.730.168,00 atau meningkat sebesar 3,36%. Peningkatan ini terjadi dikarenakan kurang salur pemerintah pusat untuk tahun 2018 yang telah dibayar.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pada tahun anggaran 2019, Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah ditargetkan sebesar Rp31.210.170.000,00 terealisasi sebesar Rp21.054.801.615,00 atau 67,46%. Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun 2018 sebesar Rp35.593.182.502,25 maka mengalami penurunan sebesar Rp14.538.380.887,25 atau 40,85% dikarenakan menurunnya pendapatan hibah IPDMIP pada tahun 2019.

3. Permasalahan dan Solusi

3.1 Permasalahan

Pelaksanaan pemungutan Pendapatan Daerah (PATDA) Provinsi Sumatera Selatan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, baik itu pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Penetapan target Pendapatan Daerah (PATDA) setiap tahunnya mengalami peningkatan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan ditahun 2019 ditargetkan penerimaannya sebesar Rp9.849.942.842.746,55 dan sampai akhir tahun 2019 dapat terealisasi sebesar Rp9.280.742.072.448,62 atau 94,22%. Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melampaui target yang telah ditetapkan atau 101,68%. Akan tetapi penerimaan transfer dari pemerintah pusat dan Lain-lain PATDA yang sah tidak melampaui target yang ditetapkan. Penerimaan transfer dari pemerintah pusat tidak disalurkan seluruhnya karena untuk tahun 2019 pemerintah pusat fokus melunasi kewajiban kurang salur beberapa tahun yang lalu sementara untuk lain-lain PATDA yang sah penerimaan Hibah IPDMIP yang tidak tercapai target dikarenakan pemerintah pusat meminta untuk dilakukan kajian ulang terhadap perencanaan kegiatan tersebut sehingga kegiatan akan dilaksanakan di tahun 2020.

Permasalahan secara khusus untuk realisasi PAD komponen pajak daerah antara lain :

- 1) Pengembangan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan belum optimal.
- 2) Sarana dan prasarana pendukung pemungutan pendapatan daerah yang berada di lingkungan Bapenda Prov. Sumsel dan UPTBKab/Kota masih belum memadai dan perlu ditingkatkan lagi.
- 3) Belum optimalnya kerjasama dengan mitra kerja terkait upaya peningkatan penerimaan pendapatan daerah Prov. Sumsel.

- 4) Pemungutan retribusi daerah yang dilakukan oleh beberapa dinas/instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang dalam pelaksanaannya terdapat beberapa yang masih belum optimal.
- 5) Perkembangan BUMD belum menggembirakan, sehingga kontribusi yang diberikan terhadap PAD masih sangat kecil.
- 6) Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak
- 7) Berkurangnya potensi penerimaan pajak alat berat karena sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi terkait pungutan pajak alat berat akan berakhir pada tanggal 10 Oktober 2020.

3.2 Solusi

Dalam upaya mengatasi berbagai masalah yang menyebabkan belum optimalnya penerimaan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Badan Pendapatan Daerah melakukan berbagai kebijakan strategis sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Bapenda Prov. Sumsel melalui pendidikan formal dan informal secara bertahap
- 2) Terus memaksimalkan kinerja tim Optimalisasi Pendapatan Daerah (OPAD)
- 3) Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pemungutan pendapatan daerah secara bertahap terutama untuk UPTB baru.
- 4) Terus membangun sinergitas dengan mitra kerja
 - ✓ Kerjasama dengan Dirlantas melalui kegiatan razia kendaraan bermotor;
 - ✓ Kegiatan penagihan pajak secara langsung melalui Tim OPAD;
 - ✓ Terus melanjutkan MoU dengan mitra kerja, seperti BP-Batam, Dirjen Pajak, BPH Migas, Bank Sumsel Babel, Disdukcapil, Pemerintah Kabupaten/Kota dan sebagainya.

- 5) Terus melakukan rapat koordinasi dengan OPD pemungut retribusi dan BUMD/BUMS yang menerima penyertaan modal dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan secara rutin.
- 6) Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap wajib pajak menuju pelayanan prima melalui inovasi-inovasi pelayanan yang dilakukan masing-masing UPTB seperti pemberian reward kepada wajib pajak.
- 7) Memperkuat sistem informasi teknologi secara bertahap terus membenahi sistem IT melalui kerjasama dengan pihak ketiga.
- 8) Meningkatkan pengawasan internal badan dan melakukan koordinasi dengan institusi pengawasan lainnya.
- 9) Inovasi pengawasan terhadap kendaraan bermotor yang belum melakukan pembayaran pajak dengan melakukan penempelan stiker tanda lunas di kendaraan bermotor
- 10) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui penyuluhan dan sosialisasi tentang pentingnya pembayaran pajak dan retribusi daerah.

4. Realisasi Pelaksanaan Program Kegiatan Tahun 2019

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun 2019, alokasi anggaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah sebesar Rp169.989.889.500,- (seratus enam puluh sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dengan total realisasi sebesar Rp152.323.260.466,- (seratus lima puluh dua milyar tiga ratus dua puluh tiga juta dua ratus enam puluh ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) atau sebesar 89,61%. Rincian alokasi anggaran pada APBD dan APBD-P Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumsel tahun 2019 disajikan dalam table 2. berikut.

Tabel.2 Anggaran Belanja Bapenda Tahun 2019

Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Tidak Langsung	138.215.860.000	125.162.777.335	90,56%
Belanja Langsung	31.774.029.500	27.160.483.131	85,48%
Total Belanja	169.989.889.500	152.323.260.466	89,61%

- Belanja Tidak Langsung sebesar Rp138.215.860.000,- (seratus tiga puluh delapan milyar dua ratus lima belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk belanja gaji dan tunjangan pegawai, tambahan penghasilan bagi PNS dan insentif pemungutan pajak daerah dengan realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2019 mencapai Rp125.162.777.335,- (seratus dua puluh lima milyar seratus enam puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) atau sebesar 90,56%
- Belanja Langsung sebesar Rp31.774.029.500,- (tiga puluh satu milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan 5 Program dan 37 Kegiatan, dengan realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2019 mencapai Rp27.160.483.131,- (dua puluh tujuh milyar seratus enam puluh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu seratus tiga puluh satu rupiah) atau sebesar 85,48%.

Rincian realisasi Anggaran Belanja Langsung untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumsel yang bersumber dari anggaran APBD Provinsi Sumatera Selatan pada tahun anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

- I. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** dengan anggaran sebesar Rp16.526.718.500,- (enam belas milyar lima ratus dua puluh enam juta tujuh ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah) dan realisasi anggaran mencapai Rp13.835.414.686- (tiga belas milyar delapan ratus tiga puluh lima juta empat

ratus empat belas ribu enam ratus delapan puluh delapan enam rupiah) atau sebesar 85,89% dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp40.218.500,- (empat puluh juta dua ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah) atau sebesar 38,64%. Realisasi fisik kegiatan ini sebesar 39,00%. Output yang dicapai dari kegiatan ini adalah 1.640 perangko dan 288 surat / berkas / laporan dilingkungan Bapenda yang terkirim.

- Permasalahan yang dihadapi di Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat adalah Operasional 8 UPTB yang baru terbentuk hanya efektif berjalan 2 (dua) bulan di tahun 2019.
- Solusi yang diajukan untuk Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat adalah harus optimalnya operasional pada 8 UPTB yang baru untuk mencapai realisasi fisik yang di anggarkan.

2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp1.780.000.000,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah). Realisasi keuangan sebesar Rp1.405.080.131,-(satu milyar empat ratus lima juta delapan puluh ribu seratus tiga puluh satu rupiah) atau sebesar 78,94%. Realisasi fisik kegiatan ini sebesar 79,00%. Output yang dicapai dari kegiatan ini adalah 38 rekening telepon, 138 Rekening Air, 399 Rekening Listrik.

- Permasalahan yang dihadapi di Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik adalah Operasional 8 UPTB yang baru terbentuk hanya efektif berjalan 2 (dua) bulan di tahun 2019.
- Solusi yang diajukan untuk Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik adalah harus optimalnya operasional pada 8 UPTB yang baru untuk mencapai realisasi fisik yang di anggarkan.

- 3) Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Realisasi keuangan sebesar Rp278.667.350,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) atau sebesar 92,89%. Realisasi fisik kegiatan ini sebesar 100,00%. Output yang dicapai dari kegiatan ini adalah 50 unit kendaraan Dinas / Operasional R4 yang mendapat jasa asuransi.
- 4) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Rp1.357.608.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta enam ratus delapan ribu rupiah). Realisasi keuangan sebesar Rp900.030.034,- (sembilan ratus juta tiga puluh ribu tiga puluh empat rupiah) atau sebesar 66,30%. Realisasi fisik kegiatan ini sebesar 66,30%. Output yang dicapai dari kegiatan ini adalah 64 unit kendaraan dinas/operasional R4 dan 22 unit kendaraan dinas/operasional R2 terpelihara.
- Permasalahan yang dihadapi di Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional adalah Operasional 8 UPTB yang baru terbentuk hanya efektif berjalan 2 (dua) bulan di tahun 2019.
 - Solusi yang diajukan untuk Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional adalah harus optimalnya operasional pada 8 UPTB yang baru untuk mencapai realisasi fisik yang di anggarkan.
- 5) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Rp1.105.300.000,- (satu milyar seratus lima juta tiga ratus ribu rupiah). Realisasi keuangan sebesar Rp1.030.857.900,- (satu milyar tiga puluh juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) atau sebesar 93,26%. Realisasi fisik kegiatan ini sebesar 100,00%. Output yang dicapai dari kegiatan ini adalah 22 Kantor yang melasanaan jasa Kebersihan Kantor.

- 6) Penyediaan Alat Tulis Kantor Rp956.000.000,- (sembilan ratus lima puluh enam juta rupiah). Realisasi keuangan sebesar Rp 863.494.542,- (delapan ratus enam puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) atau sebesar 90,32%. Realisasi fisik kegiatan ini sebesar 100,00%. Sasaran dari kegiatan ini adalah 5 jenis alat tulis kantor yang disediakan.
- 7) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Rp866.000.000,- (delapan ratus delapan puluh enam juta rupiah). Realisasi keuangan sebesar Rp670.929.470,- (enam ratus tujuh puluh juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) atau sebesar 77,47%. Realisasi fisik kegiatan ini sebesar 78,00%. Output yang dicapai dari kegiatan ini adalah 3 Jenis (cetakan umum, cetakan kutipan, cetakan laporan).
- 8) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Rp408.000.000,- (empat ratus delapan juta rupiah). Realisasi keuangan sebesar Rp 388.750.300,- (tiga ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh tiga ratus rupiah) atau sebesar 95,28%. Realisasi fisik kegiatan ini sebesar 100,00%. Output yang dicapai dari kegiatan ini adalah 2 jenis komponen instalasi listrik / penerangan yang disediakan.
- 9) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah). Realisasi keuangan sebesar Rp35.954.872,- (tiga puluh lima juta sembilan ratus lima puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) atau sebesar 99,87%. Realisasi fisik kegiatan ini sebesar 100,00%. Output yang dicapai dari kegiatan ini adalah 6.959 exemplar Bahan Bacaan, Surat Kabar dan Peraturan Perundang-Undangan Bapenda yang disediakan.

- 10) Penyediaan Makanan dan Minuman Rp168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah). Realisasi keuangan sebesar Rp161.527.500,- (seratus enam puluh satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) atau sebesar 96,15%. Realisasi fisik kegiatan ini sebesar 100,00%. Output yang dicapai dari kegiatan ini adalah 1.618 nasi kotak dan 9.929 snack kotak Makan dan Minum peserta rapat Bapenda yang disediakan.
- 11) Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran Rp8.408.392.000,- (delapan milyar empat ratus delapan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah). Realisasi keuangan sebesar Rp7.091.513.380,- (tujuh milyar sembilan puluh satu juta lima ratus tiga belas ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) atau sebesar 84,34%. Realisasi fisik kegiatan ini sebesar 85,00%. Output yang dicapai dari kegiatan ini adalah 150 orang TKS, 14 sewa gedung kantor, dan jasa keamanan untuk 30 kantor.
- 12) Penyediaan Jasa Tutor SKJ Rp13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah). Realisasi keuangan sebesar Rp12.300.000,- (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) atau sebesar 93,18%. Output yang dicapai dari kegiatan ini adalah 40 kali pelaksanaan SKJ.
- 13) Penyediaan Peralatan dan Bahan Pembersih Rp184.000.000,- (seratus delapan puluh empat juta rupiah). Realisasi keuangan sebesar Rp162.668.650,- (seratus enam puluh dua juta enam ratus enam puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah) atau sebesar 88,41%. Output yang dicapai dari kegiatan ini adalah penyediaan peralatan dan bahan pembersih untuk 30 Kantor.
- 14) Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah, ke Luar Daerah dan Luar Negeri Rp900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah). Realisasi keuangan sebesar

Rp818.101.857,- (delapan ratus delapan belas juta seratus satu juta delapan ratus lima puluh tujuh rupiah) atau sebesar 90,90%. Output yang dicapai dari kegiatan ini adalah 91 kali pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah dan 53 kali pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah.

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan Anggaran sebesar Rp7.716.000.000,- (tujuh milyar tujuh ratus enam belas juta rupiah) dan realisasi anggaran mencapai Rp7.324.582.088,-(tujuh milyar tiga ratus dua puluh empat juta lima ratus delapan puluh dua ribu delapan puluh delapan rupiah) atau sebesar 98,64% dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pembangunan Gedung Kantor Rp420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah). Realisasi keuangan sebesar Rp313.972.000,- (tiga ratus tiga belas juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) atau sebesar 74,76%. Output yang dicapai dari kegiatan ini adalah 1 Gedung dibangun.
- 2) Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Rp3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah). Realisasi keuangan sebesar Rp3.346.000.000,- (tiga milyar tiga ratus empat puluh enam juta rupiah) atau sebesar 92,94%. Realisasi fisik kegiatan ini sebesar 100,00%.Output yang dicapai dari kegiatan ini adalah 8 unit kendaraan dinas R4 yang disediakan.
- 3) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Realisasi keuangan sebesar Rp394.080.000,- (tiga ratus sembilan puluh empat juta delapan puluh ribu rupiah) atau sebesar 98,52%. Output yang dicapai dari kegiatan ini adalah pengadaan alat pendingin untuk 8 kantor UPTB baru.
- 4) Pengadaan Mebeleur Kantor Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).Realisasi keuangan sebesar Rp396.900.400,- (tiga ratus sembilan

puluh enam juta sembilan ratus ribu empat ratus rupiah) atau sebesar 99,23%. Output yang dicapai dari kegiatan ini adalah 4 jenis mebeleur kantor yang disediakan.

- 5) Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp2.140.000.000,- (dua milyar seratus empat puluh juta rupiah). Realisasi keuangan sebesar Rp2.128.410.598,- (dua milyar seratus dua puluh delapan juta empat ratus sepuluh ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah) atau sebesar 99,46%. Output yang dicapai dari kegiatan ini adalah 4 jenis peralatan Gedung kantor yang disediakan.
- 6) Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Rp220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah). Realisasi keuangan sebesar Rp217.901.700,- (dua ratus tujuh belas juta sembilan ratus satu ribu tujuh ratus rupiah) atau sebesar 99,05%. Output yang dicapai dari kegiatan ini adalah 1 Gedung Kantor yang dipelihara.
- 7) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Rp325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah). Realisasi keuangan sebesar Rp321.098.500,- (tiga ratus dua puluh satu juta sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) atau sebesar 98,80%. Output yang dicapai dari kegiatan ini adalah 2 Gedung Kantor yang dilakukan pemeliharaan.
- 8) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan kantor Rp211.000.000,- (dua ratus sebelas juta rupiah). Realisasi keuangan sebesar Rp206.218.890,- (dua ratus enam juta dua ratus delapan belas ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) atau sebesar 97,73%. Output yang dicapai dari kegiatan ini adalah pemeliharaan peralatan kantor untuk 1 tahun.

III. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan anggaran sebesar Rp253.900.000,- (dua ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dan realisasi anggaran sebesar Rp193.212.294,- (seratus sembilan puluh tiga juta dua ratus dua belas ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah) atau sebesar 85,86% , dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kontribusi Pelatihan, Seminar, Simposium dll Rp133.000.000,- (seratus tiga puluh tiga juta rupiah) dan realisasi keuangan sebesar Rp96.950.000,- (sembilan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) atau sebesar 72,89%. Output yang dicapai kegiatan ini adalah 6 orang pegawai yang mengikuti Pelatihan, Seminar, Simposium dll.
- 2) Benchmarking Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah (DID Kinerja Perencanaan Terbaik) Rp30.750.000,- (tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan realisasi anggaran sebesar Rp21.006.170,- (dua puluh satu juta enam ribu seratus tujuh puluh rupiah) atau sebesar 68,31%. Output yang dicapai kegiatan ini adalah 3 orang pegawai yang mengikuti Benchmarking Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah.
- 3) Capacity Building SDM Aparatur Bidang Perencanaan (DID Kinerja Perencanaan Terbaik) Rp40.700.000,- (empat puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) dan realisasi keuangan sebesar Rp36.458.422,- (tiga puluh enam juta empat ratus lima puluh delapan ribu empat ratus dua puluh dua rupiah) atau sebesar 89,58%. Output yang dicapai kegiatan ini adalah dua kali pelaksanaan Diklat yang diikuti 3 orang pegawai.
- 4) Benchmarking Peningkatan SAKIP Perangkat Daerah (DID Kinerja SAKIP dengan nilai A) Rp25.750.000,- (dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan realisasi keuangan sebesar Rp20.470.309,- (dua puluh juta empat ratus tujuh puluh ribu tiga ratus sembilan rupiah) atau sebesar

79,50%. Output yang dicapai kegiatan ini adalah 3 orang pegawai yang mengikuti Benchmarking Peningkatan SAKIP.

- 5) Bimbingan Teknik SAKIP Perangkat Daerah(DID Kinerja SAKIP dengan nilai A) Rp23.700.000,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan realisasi keuangan sebesar Rp18.327.393,- (delapan belas juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah) atau sebesar 77,33%. Output yang dicapai kegiatan ini adalah 3 orang pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknik SAKIP.

IV. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan anggaran sebesar Rp 2.122.705.000,- (dua milyar seratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima ribu rupiah) dan realisasi anggaran mencapai Rp1.462.910.876,- (satu milyar empat ratus enam puluh dua juta sembilan ratus sepuluh ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah) atau sebesar 69,67% dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- 1) Razia Kendaraan Bermotor Alat Berat Rp170.600.000,- (seratus tujuh puluh juta enam ratus ribu rupiah). Realisasi keuangan sebesar Rp40.537.500,- (empat puluh juta lima ratus tiga puluh juta lima ratus rupiah) atau mencapai 23,76%. Output yang dicapai dari kegiatan ini adalah 21 kali Pelaksanaan Razia Kendaraan Bermotor Alat Berat.
 - Permasalahan yang dihadapi di Kegiatan Razia Kendaraan Bermotor Alat Berat adalah Kurangnya personil UPTB yang melakukan Kegiatan ini.
 - Solusi yang diajukan untuk Kegiatan Razia Kendaraan Bermotor Alat Berat adalah akan dioptimalkan dalam operasional Tim OPAD
- 2) Razia Kendaraan Bermotor di Atas Air dengan anggaran Rp28.800.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah). Realisasi keuangan mencapai Rp2.590.000,- (dua juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah)

atau mencapai 8,99%. Output yang dicapai dari kegiatan ini adalah 1 kali pelaksanaan Razia Kendaraan Bermotor di Atas Air yang terlaksana.

- Permasalahan yang dihadapi di Kegiatan Razia Kendaraan Bermotor di Atas Air adalah Kurangnya personil UPTB yang melakukan Kegiatan ini dan tingkat kesulitan dalam pelaksanaannya.
- Solusi yang diajukan untuk Kegiatan Razia Kendaraan Bermotor di Atas Air adalah akan dilakukan koordinasi dengan Polair Polda Sumsel.

3) Razia Kendaraan Bermotor R2 dan R4 dengan anggaran Rp310.280.000,- (tiga ratus sepuluh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah). Realisasi keuangan mencapai Rp112.301.500,- (seratus dua belas juta tiga ratus satu ribu lima ratus rupiah) atau mencapai 36,19%. Output yang dicapai dari kegiatan ini adalah 21 kali Pelaksanaan razia kendaraan bermotor R2 dan R4 yang terlaksana.

- Permasalahan yang dihadapi di Kegiatan Razia Kendaraan Bermotor R2 dan R4 adalah Kurangnya personil pendukung yaitu pihak kepolisian dalam melakukan Razia Kendaraan Bermotor R2 dan R4 dan belum sinkronnya jadwal pelaksanaan dengan Ditlantas Polda Sumsel sebagai mitra pelaksanaan kegiatan ini.
- Solusi yang diajukan untuk Kegiatan Razia Kendaraan Bermotor R2 dan R4 adalah akan dilakukan penambahan personil pendukung dan sinkronisasi pada pelaksanaandengan Ditlantas Polda Sumsel

4) Pengawasan dan Pembinaan Penerimaan Pendapatan Daerah dengan anggaran Rp450.300.000,- (empat ratus lima puluh juta tiga ratus ribu rupiah). Realisasi keuangan mencapai Rp302.769.991,- (tiga ratus dua juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah) atau sebesar 63,24%. Output yang dicapai dari kegiatan ini adalah 12 kali dalam daerah dan 4 kali luar daerah Kantor Bapenda Prov. Sumsel.

- 5) Pengembangan dan Pengelolaan Patda dengan anggaran Rp146.725.000,- (seratus empat puluh enam juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah). Realisasi keuangan mencapai Rp141.042.122,- (seratus empat puluh satu juta empat puluh dua ribu seratus dua puluh dua rupiah) atau sebesar 96,13%. Output yang dicapai dari kegiatan ini adalah 11 kali reconsiliasi pajak bulanan dan 12 kali koordinasi ke luar daerah.
- 6) Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah dengan anggaran Rp650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah). Realisasi keuangan mencapai Rp568.910.765,- (lima ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah) atau sebesar 87,52. Output yang dicapai dari kegiatan ini adalah 3 kali koordinasi yang dilaksanakan.
 - Dengan pendampingan Kopsurgah KPK seluruh objek wajib pungut (Wapu) Perusahaan diundang datang ke Bapenda, sehingga mengurangi frekuensi pelaksanaan kegiatan Tim OPAD.
- 7) Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah Bidang Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah dengan anggaran Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Realisasi keuangan mencapai Rp29.260.000,- (dua puluh sembilan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) atau sebesar 58,52%. Output yang dicapai dari kegiatan ini adalah 9 kali koordinasi konsultasi dan monitoring yang di laksanakan.
 - Permasalahan yang dihadapi di Kegiatan Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah Bidang Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah adalah belum optimalnya koordinasi dengan OPD pemungut retribusi dan BUMD.
 - Solusi yang diajukan untuk Kegiatan Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah Bidang Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah adalah berupaya untuk lebih mengoptimalkan lagi terhadap kegiatan tersebut agar terlaksana dengan baik di tahun mendatang dengan cara

meningkatkan koordinasi, evaluasi dengan OPD pemungut Retribusi maupun BUMD dalam rangka peningkatan PAD.

- 8) Media Informasi dan publikasi Pajak Daerah dengan anggaran Rp316.000.000,- (tiga ratus enam belas juta rupiah). Realisasi keuangan mencapai Rp265.498.998,- (dua ratus enam puluh lima juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) atau sebesar 84,02%. Output yang dicapai dari kegiatan ini adalah 1 kali kegiatan yang dilaksanakan.

V. **Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Bidang Pendapatan Daerah** dengan anggaran sebesar Rp5.154.706.000,- (lima milyar seratus lima puluh empat juta tujuh ratus enam ribu rupiah) dan realisasi anggaran mencapai Rp4.344.363.187,- (empat milyar tiga ratus empat puluh empat juta tiga ratus enam puluh tiga ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah) atau sebesar 85,95% dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pemeliharaan dan Pengembangan Infrastruktur Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan daerah Rp4.828.056.000,- (empat milyar delapan ratus dua puluh delapan juta lima puluh enam ribu rupiah). Realisasi keuangan sebesar Rp4.024.941.187,- (empat milyar dua puluh empat juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) atau mencapai 83,37%. Realisasi fisik kegiatan ini sebesar 85,00%. Output yang dicapai dari kegiatan ini adalah 1 Sistem (Bandwidth kapasitas 114 Mbps + 1 Aplikasi.
 - Permasalahan yang dihadapi di Kegiatan Pemeliharaan dan Pengembangan Infrastruktur Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan daerah adalah masih melakukan sistem kontrak dengan penyedia jasa provider dikarenakan VPN IP merupakan belanja rutin di

Bapenda Prov. Sumsel, penambahan 8 (delapan) UPTB baru yang belum teraliri bandwidth di 8 (delapan) UPTB tersebut di Tahun Anggaran 2019 dan belum bisa update aplikasi esamsat (Edempo) menjadi IOS di AppStore pengguna Iphone karena menunggu kesiapan dari pihak Diltantas polda sumsel, yang sekarang hanya bisa berjalan di android melalui Playstore serta mengupgrade hardware perangkat server yang kurang maksimal dikarenakan Server Kesamsatan Bapenda Prov. Sumsel sudah sewajarnya diganti karena batas usia server 5 (lima) tahun, perjalanan dinas dalam dan luar daerah yang kurang maksimal dikarenakan waktu yang terbatas di anggaran APBD Perubahan Tahun 2019.

- Solusi yang diajukan untuk Kegiatan Pemeliharaan dan Pengembangan Infrastruktur Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan daerah adalah menjadikan salah satu penyedia jasa provider cukup dengan MOU (**Memorandum of Understanding**) atau Nota Kesepahaman dan diteruskan dengan perjanjian kerjasama dikarenakan VPN IP merupakan belanja rutin di Bapenda Prov. Sumsel, pergantian server kesamsatan pada Bapenda Prov. Sumsel yang sewajarnya diganti karena batas usia server 5 (lima) tahun.
- 2) Pemeliharaan Database Colocation Server Rp326.650.000,- (tiga ratus dua puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Realisasi keuangan sebesar Rp319.422.000,- (tiga ratus sembilan belas juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah) atau sebesar 97,79%. Realisasi fisik kegiatan ini sebesar 100,00%. Output yang dicapai dari kegiatan ini adalah 1 Server data base.
- Permasalahan yang dihadapi di Kegiatan Pemeliharaan Database Colocation Server adalah dari pagu DPA yang ada teralisasi dengan adanya penawaran dan HPS (harga perhitungan sendiri), dan Ingin menjadikan server di BP Batam (Database Colocation Server) menjadi

server yang utama (main) kalau terjadi permasalahan atau trouble server yang ada di Bapenda Prov. Sumsel maka server di BP Batam yang akan menghendel.

- Solusi yang diajukan untuk Kegiatan Pemeliharaan Database Colocation Server adalah dengan menambahkan jaringan backhole uptb server di BP Batam (Database Colocation Server) akan di buat **Redundant Link** (skema penggunaan jalur data ganda untuk komunikasi antara setiap lokasi pelayanan UPTB Samsat dan Bapenda), **Automatic Failover** (digunakan sebagai perangkat pemantau kondisi jalur data yang *otomatis* mengalihkan *trafik* lewat jalur data lain ketika terpantau gangguan pada salah satu jalur data), **Bonding** (sebuah teknologi yang memungkinkan agregasi lebih dari satu interface ethernet dan menggabungkan kedalam satu link virtual sehingga kita akan mendapatkan troughput bandwidth yang lebih besar) kalau terjadi permasalahan atau trouble server yang ada di Bapenda Prov. Sumsel maka server di BP Batam yang akan menghendel atau menjadi server utama (*main server*).

5. REKOMENDASI DPRD

A. REKOMENDASI UMUM :

1. Bahwa capaian realisasi Pendapatan asli daerah ditahun 2018 sebesar 94,60% dari target, maka kondisi ini harus menjadi perhatian semua pihak terhadap tidak tercapainya target tersebut dengan segera melakukan evaluasi menyeluruh mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan pelaporan secara komprehensif dan berbasis data akurat;

Jawaban :

Menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Badan Pendapatan Daerah telah melakukan evaluasi terhadap capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) mulai dari proses perencanaan, tahapan pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan pelaporan secara komprehensif dan berbasis data terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah tersebut. Berbagai kebijakan strategis telah dilakukan antara lain : memperluas jangkauan pelayanan melalui penambahan titik layanan baru, meningkatkan kerjasama dengan mitra kerja, memperbaiki sarana dan prasarana pendukung pelayanan, memperkuat sistem informasi dan teknologi serta meningkatkan pengawasan internal badan dan melakukan koordinasi dengan institusi pengawasan lainnya. Selain itu, pendampingan Tim Korsupgah Deputi Pencegahan KPK Bidang Optimalisasi Pendapatan Daerah telah melakukan supervisi per triwulan dan berdampak positif terhadap peningkatan penerimaan PAD ditahun 2019. Penerimaan PAD ditahun 2019 komponen Pajak Daerah yang menjadi tanggung jawab Badan Pendapatan Daerah melampaui target yang ditetapkan sebesar 102,40%, penerimaan Retribusi Daerah terealisasi sebesar 131,77% dan

penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan terealisasi sebesar 100,70%.

2. Bahwa capaian realisasi Dana perimbangan (DBH) tahun 2018 sebesar 90,00% dari target, namun demikian ditahun 2018 terjadi adanya perubahan/penurunan Dana bagi Hasil Migas yang penyebab utamanya adalah semakin menurunnya harga minyak mentah dipasaran dunia yang berakibat adanya penurunan perhitungan DBH Sumatera Selatan tahun 2018 sebagaimana perubahan Perpres tentang DBH. Oleh karena itu, DPRD Provinsi Sumatera Selatan merekomendasikan agar dalam penetapan target penerimaan DBH Migas kedepan tidak secara mutatis mutandis mengambil angka PMK atau Perpres, DPRD Provinsi Sumatera Selatan merekomendasikan kisaran angka 75-80% dari angka PMK atau Perpres.

Jawaban :

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018, penganggaran Pendapatan Dana Perimbangan dilakukan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Perimbangan Tahun anggaran 2018 dan apabila peraturan tersebut belum terbit maka penganggaran dana perimbangan ditetapkan dengan asumsi mempertimbangkan realisasi 3 tahun terakhir.

B. REKOMENDASI KHUSUS

1. Badan Pendapatan Daerah.

- a. Belum disampaikan data tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor posisi sampai dengan tahun 2018 agar menjadi perhatian Bapenda segera melakukan koordinasi bersama pihak terkait.

Jawaban : Untuk data tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor posisi sampai dengan tahun 2018 sedang dilakukan verifikasi data tunggakan sejalan dengan pengembangan sistem aplikasi tunggakan Samsat terbaru yaitu Samsat Online Sumsel (SOS)

- b. Untuk menekan angka tunggakan atas pajak kendaraan bermotor (R2, R4 dan alat berat) agar terus dilakukan kerjasama dengan pihak Kepolisian melakukan razia terhadap kendaraan bermotor yang menunggak pajak secara periodik dan terprogram.

Jawaban : Upaya kegiatan operasi kepatuhan/razia akan terus diintegrasikan bekerjasama dengan pihak kepolisian.

- c. Terhadap kendaraan bermotor dengan plat non BG dan alat berat yang beroperasi di Sumatera selatan dan telah melebihi batas waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang agar segera memutasikan kendaraannya.

Jawaban : upaya kegiatan operasi kepatuhan/razia akan terus diintegrasikan bekerjasama dengan pihak kepolisian serta dilakukan pendekatan ke seluruh perusahaan untuk memutasikan kendaraan operasional menjadi plat BG

- d. Untuk menghindari terjadinya kolusi antara pembayar dan penerima pajak daerah, maka program on line antar SKPD dan UPTB-UPTB Badan Pendapatan daerah agar segera direalisasikan sesuai dengan program yang telah disetujui.

Jawaban : sudah dilakukan dengan pengembangan sistem aplikasi tunggakan Samsat terbaru yaitu Samsat Online Sumsel (SOS) untuk meminimalisir permasalahan tersebut yang disertai dengan peningkatan pengawasan internal oleh Bidang Wasbin.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Tahun Anggaran 2019 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, Juli 2020

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**

Dra. Hj. NENG MUHAIBA, MM.
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 196511121995122001